

## DUKUNGAN TIONGKOK TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI IRAN PADA MASA PEMERINTAHAN HU JINTAO

Anggie Christiani

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipati  
Ukur no. 116, Bandung, 40132, Indonesia

E-mail: [gietiur@gmail.com](mailto:gietiur@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to determine how the Chinese support towards nuclear development in Iran during the leadership of President Hu Jintao. Researchers conducting research ranging from how the relationship between China and Iran in general to the Chinese attitude forms specifically on nuclear development in Iran.*

*Researchers using qualitative research methods with methods of descriptive analysis. Data obtained through the study of literature that researchers get while doing research into Indonesian Institute of Sciences and the embassy of China and Iran at Indonesia.*

*The results of this study, explained that China pledged its full support for Iran's nuclear development for peaceful purpose and there is no indication to make weapons of mass destruction. In accordance with the policy of Hu Jintao in which Iran is a signatory to the non-proliferation treaty that has the right to develop peaceful nuclear aims, and if Iran violated the law on the nuclear issue, it must be done with diplomacy without having to give sanctions and pressure on Iran.*

*The conclusion that can be drawn that China and Iran have a mutual dependency in order to meet the national interests of the country, so that the two countries support each other.*

*Keywords: China, Iran, Nuclear, China and Iran Relations.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dukungan Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran pada masa kepemimpinan Presiden Hu Jintao. Peneliti melakukan penelitian mulai dari bagaimana hubungan antara Tiongkok dan Iran secara umum hingga bentuk-bentuk sikap Tiongkok secara khusus pada pengembangan nuklir di negara Iran.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode analisa deskriptif. Data didapatkan melalui studi literatur yang peneliti dapatkan saat melakukan penelitian ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia serta Kedutaan besar negara-negara terkait yaitu Tiongkok dan Iran.

Hasil dari penelitian ini, dijelaskan bahwa Tiongkok memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan nuklir di Iran selama bertujuan untuk damai dan tidak ada indikasi untuk membuat senjata pemusnah masal. Sesuai dengan kebijakan Hu Jintao yang mana Iran adalah negara penandatangan traktat non-proliferasi sehingga memiliki hak untuk mengembangkan nuklir yang bertujuan damai, dan bilamana Iran melakukan pelanggaran hukum dalam masalah nuklir, maka harus dilakukan usaha diplomasi tanpa harus memberikan tekanan dan sanksi terhadap Iran.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Tiongkok dan Iran memiliki rasa saling ketergantungan guna memenuhi kepentingan nasional negaranya, sehingga kedua negara saling mendukung satu sama lain.

Kata Kunci: China, Iran, Nuklir, Hubungan China dan Iran

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan dua anggota Dewan Keamanan Tetap PBB yang tentunya memiliki kekuatan di kancah dunia internasional. Peluang usaha demi memenuhi kepentingan nasionalnya pasti akan dicari dan digunakan semaksimal mungkin. Seperti halnya dengan negara-negara Timur Tengah yang mempunyai banyak cadangan minyak yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara industri seperti Amerika dan Tiongkok.

Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang rentan akan konflik. Setiap tahun terjadi pergejolakkan di negara-negara Timur Tengah. Hal ini sudah menjadi bahasan Ilmu Hubungan Internasional secara turun temurun dan belum pernah ada penyelesaiannya. Kawasan Timur Tengah terdiri dari negara-negara Arab yang setiap negaranya memiliki keinginan untuk berada dalam satu kesatuan, namun pada kenyataannya kepentingan nasional tiap negara menjadikan negara-negara Timur Tengah saling bersitegang (Lenczowsky, 2003:381).

Selain faktor perbedaan yang muncul dalam internal kawasan Timur Tengah sendiri, juga ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini muncul karena melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki negara-negara Timur Tengah, terutama minyak bumi. Negara-negara maju berebut untuk mengadakan kerjasama dengan negara-negara penghasil minyak bumi di Timur Tengah sehingga perseteruan antar negara maju tersebut memancing persaingan negara-negara Timur Tengah untuk menjadi yang terbaik.

Iran adalah salah satu negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Iran memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga banyak negara yang menginginkan melakukan kerjasama dengan negara ini. Selain itu, Iran juga melakukan pengembangan nuklir yang diperoleh dari Amerika Serikat dengan tujuan riset nuklir dengan kekuatan hanya 5 megawatt yang mulai beroperasi pada tahun 1967 (<http://arifnurcahyo-janisary.blogspot.com/2011/12/nuklir-iran-siapa-yang-mena-nam-angin.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Untuk membatasi pengembangan senjata nuklir di dunia, dibentuk perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir diantara negara-negara pemilik nuklir yang diatur melalui Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) pada tahun 1968, namun Iran baru menandatangani perjanjian tersebut pada tahun 1970. Selain NPT, Iran juga menandatangani Safeguards Agreement dengan International Atomic Energy Agency pada tahun 1974 yang

bertujuan agar badan dunia dapat mengawasi pengembangan program nuklir Iran (<http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/> diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Iran terus melakukan pengembangan program nuklirnya dibawah pemerintahan Shah Iran dengan melakukan beberapa bentuk kerjasama dengan perusahaan Eropa di Jerman dan Perancis. Pengembangan nuklir terus berjalan hingga terhenti pada tahun 1979 saat terjadi Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini.

Selama pemerintahan Khomeini, proyek pembangunan reaktor nuklir dihentikan karena dianggap merupakan bentuk pemenuhan ambisi Shah semata yang mana menghabiskan dana lebih dari 30 milyar dolar, padahal pembangunan beberapa reaktor nuklir sudah hampir selesai. Reaktor Bushehr 1 sudah selesai sekitar 90% dan 60% peralatannya telah dipasang, serta Reaktor Bushehr 2 sudah mencapai 50%. Selain karena dana yang digunakan sangat besar dalam mengembangkan nuklir di Iran, Perdana Menteri Mehdi Bazargan juga menganggap bahwa Iran tidak membutuhkan energi nuklir bersamaan dengan krisis keuangan di Iran dan terjadi ketegangan hubungan Iran dengan barat, maka dari itu pembangunan reaktor nuklir di Iran dihentikan (<http://www.informationclearinghouse.info/article30177.htm> diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Pada tahun 1990, Iran bekerjasama dengan Rusia untuk memperbaiki Reaktor Bushehr 1, namun akhirnya dibatalkan karena masalah keuangan. Bantuan pertama yang didapat Iran adalah pada tahun 1991 dari Tiongkok berupa kiriman pasokan material, uranium hexafluoride, tetra fluoride dan uranium dioxide dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Hal ini tidak diketahui oleh IAEA dan merupakan awal mula bentuk dukungan Tiongkok terhadap program nuklir Iran (Parillo, 2006:2).

Berdasarkan pertimbangan karena hubungan Iran dan barat memburuk, krisis keuangan di Iran serta kekacauan pasca peperangan dengan Irak, maka pada masa pemerintahan Rafsanjani sekitar tahun 1995, pengembangan program nuklir ini kembali dilanjutkan, begitu juga pada masa kepemimpinan Khatami. Namun pada tahun 2003 masalah mengenai pengembangan program nuklir di Iran mulai muncul karena laporan dari pihak oposisi Iran yang diasingkan bahwa Iran melakukan pengembangan program nuklir rahasia dan tidak aman serta disembunyikan dari para petugas Badan Energi Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEA).

Karena hal inilah sehingga terjadi krisis nuklir di Iran (Parillo, 2006:2).

Tekanan demi tekanan Iran dapatkan karena program nuklirnya. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. Kesembilan resolusi ini tentunya didukung oleh Dewan Keamanan Tetap maupun tidak tetap PBB, namun ternyata Tiongkok dan Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan tetap PBB yang ikut merumuskan resolusi 1747 atau resolusi ketiga yang dikeluarkan DK PBB memberikan dukungan terhadap program nuklir Iran dan mengharapkan masalah nuklir Iran ini dapat diselesaikan secara damai melalui jalan diplomasi. Tiongkok dan Rusia menganggap bahwa jalur diplomasi adalah cara yang tepat untuk mengatasi sikap Iran yang keras mengenai program nuklirnya (<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38741> diakses pada tanggal 4 Mei 2014).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki kerjasama cukup panjang dan stabil dengan Iran. Hal ini terjadi karena Tiongkok adalah negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam energi sehingga negara ini tergantung pada impor minyak dan gas dari negara lain. Tiongkok akan terus melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara-negara penghasil energi, yang mana Iran adalah salah satu rekan terkuat Tiongkok.

Hu Jintao memberikan pernyataan bahwa Tiongkok selalu mendukung pengembangan nuklir Iran yang mana berguna untuk membangun pembangkit listrik di Iran. Hu Jintao berharap masalah nuklir ini dapat diselesaikan melalui cara diplomasi tanpa harus memberikan sanksi kepada Iran. Iran adalah negara yang menandatangani Traktat non-Proliferasi Nuklir, Konvensi Senjata Biologi dan Konvensi Senjata Kimia sehingga wajib untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Iran jelas telah membantah melakukan pengembangan ataupun memiliki senjata pemusnah massal sehingga organisasi terkaitlah yang mempunyai wewenang menyelesaikan masalah keraguan ini melalui cara negosiasi, konsultasi dan dialog dengan negara Iran karena seharusnya non-proliferasi tidak menghalangi pengembangan nuklir yang bertujuan damai (<http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t28673.htm> diakses pada tanggal 1 Juni 2014).

Di tahun 2007 saat Hu Jintao melakukan diskusi mengenai beberapa isu dengan Bush, Presiden Amerika saat itu, terkait nuklir Iran, Tiongkok akan tetap bersikeras menyelesaikan isu nuklir Iran melalui jalur negosiasi diplomatik secara damai. Di tahun 2007 sendiri

telah dikeluarkan total 3 resolusi DK PBB mengenai isu nuklir Iran, namun Tiongkok tetap pada sikapnya yang menolak memberikan sanksi pada Iran. Menurut Hu dengan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi tentu akan melindungi perdamaian dan stabilitas regional yang pasti akan memenuhi kepentingan setiap pihak yang terkait ([http://english.pravda.ru/news/world/06-12-2007/102399-nuclear\\_questions-0/#.U5S0eHb\\_i00](http://english.pravda.ru/news/world/06-12-2007/102399-nuclear_questions-0/#.U5S0eHb_i00) diakses pada tanggal 2 Juni 2014).

Peneliti merasa sikap Tiongkok terhadap Iran cukup menarik untuk dibahas secara lebih dalam dan menjadikan masalah ini sebagai bahan untuk penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka masalah yang akan diteliti dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Rumusan Masalah Mayor:

Bagaimana dukungan Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao dari tahun 2003 hingga tahun 2013?

### Rumusan Masalah Minor:

1. Bagaimana hubungan luar negeri antara Iran dan Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013)?
2. Apakah kepentingan Tiongkok sehingga mendukung pengembangan nuklir di Iran?
3. Bagaimana respon Iran terhadap dukungan Tiongkok pada pengembangan nuklirnya?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana dukungan Tiongkok terhadap program nuklir Iran dan apa kepentingan Tiongkok terhadap dukungannya tersebut sejak tahun 2003 hingga 2013 saat PBB memberikan sanksi terhadap Iran melalui resolusinya. Tiongkok merupakan negara great power dan juga salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sehingga sikap yang diberikan Tiongkok akan menjadi sebuah dukungan yang dibutuhkan Iran. Dengan begitu tentunya penelitian ini akan menjelaskan juga respon Iran terhadap dukungan Tiongkok tersebut.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan keterangan yang jelas mengenai hubungan luar negeri antara Tiongkok dan Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao (2003-2013).

2. Mengetahui lebih lanjut kepentingan yang dimiliki Tiongkok sehingga mendukung pengembangan nuklir Iran.
3. Untuk mengetahui seperti apa respon Iran terhadap dukungan Tiongkok bagi pengembangan nuklirnya.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

##### Kegunaan Teoritis:

Bagi Ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi sebagai materi yang dapat disampaikan dan juga bisa memberikan tambahan ilmu yang cukup otentik bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai sikap-sikap Tiongkok berupa dukungan terhadap pengembangan nuklir di Iran pada masa pemerintahan Hu Jintao tahun 2003 hingga 2008 serta periode kedua tahun 2008 hingga tahun 2013, juga bagaimana Iran merespon dukungan Tiongkok tersebut dan juga kerjasama kedua negara sebagai tindak lanjut atas sikap-sikap tersebut sehingga dapat menjadi bahasan yang cukup berbobot di lingkup studi Ilmu Hubungan Internasional.

##### Kegunaan Praktis:

Bagi Peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk lebih memperdalam pengetahuan mengenai program studi Ilmu Hubungan Internasional dari segi kerjasama internasional yang mana kerjasama kedua negara dapat terjadi karena adanya kepentingan antar negara.

Bagi Lembaga Akademik, diharapkan penelitian bisa menjadi referensi dan menjadi sumbangan data mengenai hubungan Tiongkok dan Iran mengenai pengembangan nuklir di Iran.

Bagi Mahasiswa dan Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi untuk lebih memahami bagaimana hubungan Iran dan Tiongkok melalui sikap-sikap dan motif Tiongkok dalam menanggapi pengembangan nuklir Iran, baik dari segi positif maupun negatif serta secara formal maupun informal.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

### 2.1 Kajian Pustaka

Untuk menjelaskan beberapa penelitian yang peneliti gunakan dalam meneliti Dukungan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran, dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Kajian Pustaka

Peneliti	Judul	Kesimpulan
Agung Nugroho	Dukungan Cina terhadap Program Nuklir Iran (2006-2009)	Tiongkok merupakan salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mana mempunyai hubungan yang baik dengan Iran dan selama tahun 2006 – 2009 mendukung program nuklir Iran melalui pengiriman barang pendukung serta menentang resolusi PBB mengenai sanksi terhadap program nuklir Iran .
Tri Cahyo Utomo	Akuntabilitas Program Nuklir Iran	Bagaimana program nuklir Iran menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi Amerika Serikat sedangkan pada awal mula pembentukannya diberikan dana oleh AS sendiri.
Tide Aji Pratama	Kebijakan Nuklir Iran dalam Menghadapi Respon Barat Pada Masa Mahmoud Ahmadinejad	Dalam pengembangannya, nuklir di Iran telah banyak menuai konflik. Iran selalu mengatakan bahwa nuklir digunakan untuk kepentingan perdamaian dunia, namun menurut penelitian, pengembangan nuklir di Iran digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal.
Dyah Kusuma ningayu Ratna Kartika	Alasan Perubahan Sikap China Terhadap Masalah Nuklir Iran Tahun 2010	China selama berpuluh-puluh tahun selalu mendukung pengembangan program nuklir Iran, namun pada tahun 2010 Tiongkok menandatangani resolusi PBB yang memberikan sanksi kepada program nuklir Iran tentunya dengan alasan yang tidak merugikan negaranya.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Hubungan Internasional

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai apa itu teori hubungan internasional. Menurut Mochtar Mas<sup>oed</sup>,

“Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara di dalam area transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.” (Mas<sup>oed</sup>, 2000:28).

J. C. Johari memberikan pendapatnya dalam *New Comparative Government* mengenai definisi dari hubungan internasional, yaitu

“Hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat disamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non negara (non states actors) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.” (Johari, 2006:16).

### 2.2.2 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005:7).

Setiap negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, namun untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, setiap negara harus melakukan kerjasama dengan negara lain, dan tujuan utama politik luar negeri adalah kepentingan nasional tersebut. Untuk memenuhi

kepentingan nasionalnya tersebut negara akan melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Politik luar negeri merupakan poros dibentuknya kebijakan luar negeri.

Membahas politik luar negeri yang merupakan upaya pemenuhan kepentingan nasional yang bersifat ekstern, maka tentunya akan berhubungan dengan politik internasional sebagai arena bertemunya beberapa politik luar negeri negara-negara di dunia sehingga dapat saling memenuhi kepentingan nasionalnya melalui hubungan internasional yang mana dapat dilaksanakan melalui bentuk kerjasama. Penekanan politik internasional yaitu pada respon atau reaksi bukan aksi, karena dengan adanya respon maka politik internasional dapat terlaksana dengan negara sebagai aktor utamanya.

### 2.2.3 Kebijakan Luar Negeri

Dalam Kamus Hubungan Internasional, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan:

“Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.” (1999:5)

Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Output kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan politik, yaitu dalam kebijakan, sikap dan tindakan negara lain. Sikap dan gagasan mengenai kebijakan luar negeri dibagi ke dalam 4 komponen, baik yang umum maupun yang spesifik, yaitu orientasi kebijakan luar negeri, peran nasional, tujuan dan tindakan.” (Holsti, 1998:108).

Kajian mengenai teori proses pembuatan keputusan luar negeri menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan nasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif

yang ada, dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijakan yang mungkin dilakukan dan semua sumber yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. (Mas'ood, 1990:276).

#### 2.2.4 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau dalam "*The Concept of Interest defined in Terms of power*", konsep kepentingan nasional (*interest*) yang didefinisikan dalam istilah "*power*" berada diantara nalar, akal atau "*reason*" yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008:67).

Menurut Anthonius Sitepu dalam Teori Realisme Politik Hans J. Morgenthau dalam Studi Politik dan HI, konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya.

Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep „*power*“ kepentingan „*interest*“ didefinisikan ke dalam terminologi power.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional (Rudy, 2002:116).

#### 2.2.5 Keamanan Internasional

Keamanan dalam hubungan internasional mengalami pergeseran dari konsep tradisional yang mengutamakan masalah perang dan damai menjadi konsep modern yang lebih mengutamakan human security dan aspek-aspek lainnya, sehingga tidak memfokuskan pada hubungan antarnegara tetapi juga keamanan pada masyarakatnya.

Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh

negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB dalam menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan terus berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini cakupannya mulai dari tipe tradisional yaitu konvensional kekuatan militer, sebab dan akibat perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologi, konflik perdagangan dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, makanan serta ancaman terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara dari degradasi lingkungan, penyakit menular, perubahan iklim, dan kegiatan para aktor non-negara ([http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_security](http://en.wikipedia.org/wiki/International_security) diakses pada tanggal 20 Mei 2014 ).

Selama periode perang dingin, literatur mengenai keamanan didominasi gagasan mengenai keamanan nasional yang sebagian besar diartikan secara militeristik. Berdasarkan sudut pandang tersebut, keamanan nasional yang diukur dari kepemilikan kapabilitas militer suatu negara menjadi prioritas paling pertama. Gagasan mengenai keamanan berpusat pada negara sehingga mengutamakan keamanan nasional dan sempit karena terfokus pada aspek militer dari keamanan nasional. Kritik datang dari beberapa pihak, seperti halnya pemaparan bahwa keamanan seharusnya mencakup lima aspek, yaitu keamanan politik, ekonomi, sosial, lingkungan dan militer sehingga fokus utama dapat dialihkan kepada keamanan secara internasional (Buzan, 2008:10).

#### 2.2.6 Nuklir

Dalam dunia internasional, energi nuklir diatur secara ketat karena penggunaannya dapat dijadikan sebagai senjata pemusnah masal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Roberto Phispal dalam *Lex et Societatis* vol. 1 no. 5 bulan September 2013, pengembangan teknologi nuklir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah pengembangan teknologi nuklir yang memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Peran International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai organisasi internasional yang mengawasi pengembangan teknologi nuklir agar tetap dikembangkan untuk tujuan damai dan tidak dibelokkan kearah pengembangan senjata nuklir, sesuai dengan isi statuta IAEA.
2. Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penyebaran senjata nuklir. Perjanjian ini memiliki tiga prinsip

utama, yaitu : Nonproliferasi, pelucutan, dan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

3. Safeguards adalah sebuah sistem yang berisi pengaturan lebih luas mengenai tindakan teknis dimana sekretariat IAEA memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dari pengumuman yang dibuat oleh negara mengenai materi dan aktifitas nuklir. (Hendrasica, 2007: Abstrak Tesis Universitas Diponegoro).

Terdapat beberapa peraturan internasional berbentuk perjanjian internasional yang berlaku bagi para negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Berikut beberapa perjanjian yang dikeluarkan oleh IAEA:

1. Perjanjian Internasional Ketenaganukliran:
  - Traktat/Konvensi Internasional tentang Keselamatan Nuklir (Safety).
  - Traktat/Konvensi Internasional tentang Keamanan Nuklir (Security).
  - Traktat/Konvensi Internasional tentang Pengawasan Nuklir (Safeguards).
  - Traktat/Konvensi Internasional tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir (Liability).

2. Aspek Keselamatan dan Pengendalian Bahan Nuklir

Komitmen dalam meluncurkan program nuklir harus memiliki perhatian khusus dengan poin-poin sebagai berikut:

- Perlunya memastikan keselamatan, keamanan dan non-proliferasi bahan nuklir.
- Perlunya menjadi pihak pada perjanjian dan konvensi internasional yang relevan.
- Perlunya mengembangkan suatu kerangka peraturan perundang-undangan komprehensif yang mencakup semua aspek hukum nuklir: Keselamatan (Safety), Keamanan (Security), Pengawasan (Safeguards), Pertanggungjawaban (Liability) Kerugian dan aspek komersialnya.
- Perlunya badan pengawas yang independen, kompeten dan efektif.
- Perlunya mengembangkan dan mempertahankan kemampuan sumber daya nasional baik dalam sektor pemerintah maupun industri agar dapat mengelola, mengoperasikan, memelihara dan mengatur fasilitas nuklir.
- Adanya suatu undang-undang dan penerapan instrumen hukum internasional yang relevan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Ketenaganukliran dan Kerangka Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa tingkatan hierarki hukum nasional sebagai dasar norma hukum pengaturan energi nuklir:

- Tingkat Konstitusi
  - Tingkat Legislasi
  - Tingkat Regulasi
  - Tingkat Instrumentasi
4. Hukum Nuklir Internasional  
Karakteristik Hukum Nuklir meliputi beberapa prinsip sebagai berikut:
    - Prinsip Keselamatan (Pencegahan, perlindungan, pemberian peringatan)
    - Prinsip Keamanan (Bahan dan teknologi nuklir, sumber-sumber, bahan yang disalahgunakan)
    - Prinsip Tanggung Jawab (Melibatkan banyak pihak. Tanggung jawab pihak terkait)
    - Prinsip Perizinan (Izin menjadi hal utama untuk pengembangan bahan-bahan isotop)
    - Prinsip Pengawasan Berkelanjutan (Pemantauan kegiatan nuklir)
    - Prinsip Kepatuhan (Patuh akan peraturan yang berlaku)
    - Prinsip Kompensasi (Kompensasi bila terjadi kerugian)
    - Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Keberlangsungan generasi mendatang)
    - Prinsip Independensi (Pertimbangan ahli menjadi sangat diperhitungkan)
    - Prinsip Transparansi (Transparansi pemanfaatan energi nuklir)
    - Prinsip Kerjasama Internasional (Pertimbangan harmonisasi kebijakan dan tindakan antar negara)
  5. Penerapan Sanksi atas Pelanggaran dan Penyalahgunaan Pemanfaatan Tenaga Nuklir menurut Hukum Internasional.

IAEA menerbitkan Buku Panduan Hukum Nuklir yang terdiri atas 5 bagian umum mengenai hukum-hukum internasional mengenai pengembangan nuklir. Lima bagian umum tersebut adalah:

- Bagian I memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep kunci dalam bidang: hukum energi nuklir dan proses legislatif, pihak otoritas, dan kegiatan peraturan dasar perizinan, inspeksi dan penegakan hukum.
- Bagian II berhubungan dengan proteksi radiasi.
- Bagian III mencakup berbagai mata pelajaran yang timbul dari keselamatan nuklir dan radiasi: sumber radiasi, instalasi nuklir, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, pertambangan dan penggilingan, transportasi, dan limbah serta bahan bakar bekas.

- Bagian IV membahas topik kewajiban nuklir dan cakupan.
- Bagian V beralih pada non-proliferasi dan keamanan subjek yang terkait: perlindungan, kontrol ekspor dan impor, dan perlindungan fisik ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_law](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_law) diakses pada tanggal 1 Juli 2014).

### 3. Objek dan Metode Penelitian

#### 3.1 Objek Penelitian

##### 3.1.1 Tiongkok

Tiongkok merupakan sebuah negara dengan wilayah daratan yang sangat luas, terletak di wilayah Asia Timur dengan Beijing sebagai ibukotanya. Nama resmi Tiongkok adalah Republik Rakyat Tiongkok. Negara ini juga adalah negara terpadat penduduknya di dunia. Dengan luas wilayah ±9.600.000 km<sup>2</sup>, jumlah penduduknya mencapai ±1.507.000.490 jiwa pada tahun 2012 sehingga kepadatan penduduknya mencapai 156 jiwa/km<sup>2</sup>.

Letak geografis Tiongkok berbatasan dengan Mongolia di sebelah utara, Laut Tiongkok Timur dan Laut Kuning di sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan negara Nepal, Buthan, India, Myanmar, Laos dan Vietnam serta Pakistan dan Afganistas di sebelah barat. Secara astronomis, letak Tiongkok berada pada posisi 18° LU-54° LU dan 73° BT-135° BT.

Bentuk pemerintahan negara Tiongkok adalah Republik Komunis (marxisme-leninisme) dengan partai tunggal yang dipimpin oleh seorang Presiden dan Perdana Menteri. Namun pelaksanaan kekuasaan pemerintahan Tiongkok secara efektif tetap dipegang oleh para pemimpin Partai Komunis. Presiden Tiongkok tahun 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013 adalah Hu Jintao, sejak tahun 2013 yaitu Xi Jinping, Perdana Menteri Li Keqiang. Ketua Kongres Zhang Dejiang dan Ketua Konferensi Yu Zhengsheng yang mana keduanya sebagai pemimpin badan legislatif Tiongkok yaitu Kongres Rakyat Nasional.

Pendapatan Tiongkok diperkirakan sekitar tahun 2013 sebesar \$13.374 triliun dengan pendapatan per kapitanya mencapai \$9.828. Berdasarkan Pendapatan domestik brutonya, Tiongkok menempati posisi kedua tertinggi di dunia dan pendapatan perkapitanya berada di posisi ke 90.

Politik luar negeri Tiongkok erat kaitannya dengan tujuan Tiongkok menjadi salah satu negara besar dalam politik dan ekonomi internasional. Tujuan strategis politik luar negeri Tiongkok yaitu melindungi

kemerdekaan, kedaulatan dan keamanan Tiongkok serta melindungi dan menopang pembangunan ekonomi dan teknologi, menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Asia Pasifik, memberi respon efektif pada tantangan dan ancaman dari luar, mencegah konflik internal dan eksternal, meningkatkan status dan prestis Tiongkok di dunia internasional (<http://www.foreignpolicy.com/C> hina diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Tiongkok adalah negara yang tertutup mengenai pengembangan nuklir di negaranya. Negara ini adalah salah satu negara yang memiliki senjata nuklir. Kekuatan nuklir Tiongkok dimulai pada saat uji coba senjata nuklirnya pertama kali pada 1964 yang mengagetkan badan intelejensi barat. Tiongkok memperoleh pengetahuan mengenai nuklir dari Uni Soviet, namun terhenti saat pemisahan Sino-Soviet.

Tiongkok melakukan pengujian bom hidrogen pada tahun 1967 di Lop Nur, daerah pegunungan Himalaya. Percobaan tersebut menghasilkan kekuatan 3,3 megaton atau setara dengan 231 kali kekuatan bom atom di Hiroshima, padahal percobaan Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya hanya mencapai 2,8 megaton. Diperkirakan kapasitas nuklir Tiongkok berada pada urutan kedua setelah Amerika Serikat (<http://global.indonesianvoices.org/2013/10/rahasia-pengembangan-nuklir-Cina.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

##### 3.1.2 Iran

Iran merupakan negara berbentuk Republik Islam yang terletak di Asia Barat Daya dan merupakan salah satu bagian dari Timur Tengah dengan batasan koordinat 32,25°LU dan 53,75°BT. Negara Iran berbatasan dengan Azerbaijan dan Armenia di bagian barat laut, Laut Kaspia di utara, Turkmenistan di timur laut, Pakistan dan Afganistan di timur, Turki dan Irak di barat, serta Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan ([http://en.wikipedia.org/wiki/Geography\\_of\\_Iran](http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Iran) diakses pada tanggal 8 Maret 2014). Teheran sebagai kota terbesar di Iran juga merupakan ibukota negara ini (Thohir, 2009:192).

Bentuk pemerintahan Iran pada awalnya merupakan monarki yaitu sebelum terjadinya revolusi Iran yang mana memberikan kekuasaan penuh bagi individu yang menjadi keturunan pemegang kekuasaan sebelumnya. Setelah revolusi terjadi di Iran, bentuk pemerintahan Iran menjadi Republik (Syafie dan Azikin, 2007:64-67).

Negara Iran memiliki luas daratan 1.636.000 km<sup>2</sup> dan luas perairan hanya 12.000

km<sup>2</sup>, sehingga luas wilayah Iran totalnya sekitar ±1.648.000 km<sup>2</sup>. Dengan wilayah yang tidak terlalu luas, penduduk yang tinggal di Iran mencapai 77.176.930 jiwa, sehingga dapat diperkirakan bahwa kepadatan penduduknya mencapai 48 jiwa/km<sup>2</sup>. Pendapatan domestik bruto negara Iran mencapai \$988,437 miliar per tahun 2012 dan pendapatan per kapitanya hanya mencapai \$12.986 (<http://www.countryreports.org/country/Iran.htm> diakses pada tanggal 8 Maret 2014). Iran mengandalkan kekayaan minyak dan gas bumi, batu bara, tembaga, bijih besi, timah dan sulfur. Aset mineral yang sangat melimpah adalah minyak, yang mana menjadikan Iran sebagai negara penghasil mineral terbanyak peringkat empat di dunia (Thohir, 2009:196).

Iran merupakan salah satu negara Timur Tengah yang sangat rentan akan konflik karena kerasnya kepemimpinan negara Islam ini, yang mana dalam setiap kebijakannya bersifat tegas dan tidak terpengaruh oleh dunia internasional. Pemimpin Iran dikenal sangat anti terhadap segala hal yang berhubungan dengan negara barat, terutama Amerika Serikat. Seperti yang sudah dunia ketahui bahwa Iran adalah musuh utama Amerika Serikat karena kemampuannya bertahan dari segala pengaruh Amerika yang dapat dikatakan sebagai negara superpower dengan kekuatan yang tidak terbatas karena banyaknya negara yang menjadi sekutunya.

Sistem pemerintahan Iran sendiri berdasarkan pada ajaran Islam mazhab syiah yang cenderung bersifat teokratis. Sistem politik Iran berasaskan konstitusi yaitu undang-undang dasar atau dalam bahasa Persia disebut Qanun-e Asasi. Pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli yang mana tugas pemimpin agung tersebut adalah bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran. Dalam bidang eksekutif, Presiden memiliki kepemimpinan tertinggi kedua yang bertugas untuk memastikan diikutinya konstitusi negara. Presiden dipilih oleh Majelis Wali yang terdiri dari 12 orang ahli undang-undang yang mana 6 orang dipilih oleh pemimpin agung. Bilamana terjadi bersitegang antara Parlemen dan Majelis Wali, maka Majelis Kebijaksanaan yang akan mengatasinya, yang juga bertugas sebagai penasihat pemimpin agung. Parlemen sendiri memiliki 290 anggota yang bertugas selama 4 tahun. Pemimpin agung memilih Kehakiman sebagai pengontrol perlindungan masalah kejahatan dan keselamatan negara. Majelis ahli menjadi perwakilan rakyat yang beranggotakan 86 orang ahli agama sebagai pemantau dan pelaksana pemilihan Pemimpin Agung, Presiden serta Parlemen secara acak.

Iran memiliki landasan negara yaitu syariat Islam yang tentunya mempengaruhi segala kebijakan negaranya, begitu juga mengenai politik luar negerinya. Iran yang anti barat menganggap bahwa pandangan di dunia ini mengenai dominasi negara terhadap negara lain harus dihapuskan (Hinnebusch, 2003:192-193).

Iran adalah negara yang memiliki sumber daya alam melimpah berupa gas alam. Selain itu Iran juga memiliki kemampuan untuk mengayakan uranium. Hal ini membuat Iran mampu mengembangkan nuklir di negaranya. Isu mengenai program nuklir di Iran terus bergulir mulai dari ketidakpercayaan negara Barat terhadap pengembangan nuklir Iran hingga sikap-sikap positif yang ditunjukkan Tiongkok dan Rusia terhadap pengembangan nuklir di Iran ([http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_program\\_of\\_Iran](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran) diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran mengembangkan nuklirnya pertama kali pada masa kepemimpinan Reza Pahlevi dengan dukungan barat. Namun pasca Iran mengalami revolusi yang juga mengakibatkan putusnya hubungan anatar Iran dan Amerika Serikat, maka pengembangan nuklir dihentikan karena dianggap sebagai hasrat dari Reza Pahlevi saja (<http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Iran/> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran pun membekukan pengembangan nuklirnya hingga pada akhirnya terjadi krisis di Iran dan kembali dibukanya pengembangan nuklir di Iran guna menjadi sumber pembangkit tenaga nuklir di Iran. Tahun demi tahun dilalui Iran dengan pengembangan nuklir yang senantiasa ditolak oleh barat karena dalam hal ini barat telah kehilangan kendali akan pengembangan nuklir di Iran. Amerika Serikat terus menekan Iran hingga akhirnya dikeluarkanlah resolusi DK PBB yang memberikan sanksi kepada Iran agar menghentikan pengembangan nuklirnya. Iran bukanlah negara yang gentar akan gertakan dari Amerika Serikat, bahkan dengan diberikannya sanksi, Iran semakin giat mengembangkan program nuklirnya dengan bantuan beberapa negara seperti Tiongkok dan Rusia.

### 3.1.3 Hubungan Bilateral Tiongkok dan Iran

Dalam bidang politik, jelas mengutamakan hubungan diplomatik kedua negara yang resmi pada tahun 1971. Kedutaan Iran pertama dibentuk pada bulan Desember 1973 dan Abbas Aram diangkat menjadi diplomat Iran untuk Tiongkok yang pertama. Saat ini, Duta

Besar Iran untuk Tiongkok adalah Javad Mansouri. Menurut survei *Pew Global Attitudes* tahun 2012, Tiongkok memiliki 62% pendapatan yang tidak menguntungkan dari Iran, hanya sekitar 21% saja pendapatan yang menguntungkan (<http://id.wikipedia.org/wiki/Iran> diakses pada tanggal 10 Maret 2014).

Pilar utama hubungan Tiongkok dan Iran adalah minyak dan gas. Tiongkok beralih ke minyak bumi terutama untuk mendapatkan pasokan energi mereka dari batu bara. Ada peningkatan pesat dalam impor minyak dari tahun 1974 ke tahun 1990-an. Pada tahun 2011, sekitar 10% dari impor minyak Tiongkok berasal dari Iran. Sekitar 80% dari total impor Tiongkok dari Iran adalah minyak dan sisanya adalah mineral dan produk kimia. Karena ketergantungan pada minyak dan gas Iran, Tiongkok sekarang berinvestasi dalam modernisasi sektor minyak dan gas Iran untuk mengamankan akses ke sumber daya. The China National Petroleum Corporation (CNPC) telah diberikan kontrak \$ 85.000.000 untuk mengebor 19 sumur di ladang gas alam di selatan Iran dan ditandatangani kontrak lain yang serupa sebesar \$ 13.000.000. Kemudian pada tahun 2004, sebuah kesepakatan dicapai dimana Tiongkok akan mengimpor 270 juta ton gas alam lebih dari 30 tahun dari bidang South Par yang merupakan ladang gas alam terkaya di dunia sebesar \$70 miliar. Perusahaan Tiongkok lain, Sinopec Group, mendapat setengah saham di ladang minyak Yadarvaran senilai sekitar 100 miliar untuk tujuan eksplorasi. Kemudian pada tahun 2007, CNPC menandatangani kesepakatan \$ 3,6 miliar untuk mengembangkan ladang gas lepas pantai di Iran dan kemudian menandatangani \$ 2 miliar kontrak untuk mengembangkan ladang minyak utara Iran dekat Ahvaz. Tiongkok tidak hanya membantu mengembangkan sektor minyak dan gas, tapi Tiongkok mendukung ambisi Iran untuk membawa minyak dan gas Laut Kaspia ke pelabuhan Iran selatan melalui pipa sehingga sumber daya dapat diekspor ke Eropa dan Asia. Iran bergantung pada penjualan minyak ke Tiongkok untuk memastikan fiskal kesejahteraan nya. Tiongkok juga menjual bensin ke Iran meskipun tekanan internasional yang telah menghentikan kemampuan Iran untuk mendapatkan bensin dari pemasok lain (<http://nkrinews.com/index.php/internasional/1783-china-dan-iran> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Tiongkok diyakini telah membantu Iran secara militer dalam bidang berikut: melakukan pelatihan pejabat tingkat tinggi dengan sistem canggih, memberikan dukungan teknis, pasokan baja khusus untuk konstruksi

rudal, menyediakan teknologi kontrol untuk pengembangan rudal, membangun pabrik rudal dan uji jarak. Hal ini dikabarkan bahwa Tiongkok bertanggung jawab untuk membantu dalam pengembangan senjata konvensional canggih, pesawat tempur, sistem radar, dan kapal rudal serangan cepat. Sejak tahun 1990-an hubungan antara Tiongkok dan Iran berada di bawah pengawasan ketat oleh Amerika Serikat (<http://islamtimes.org/vdcaiin6y49nuo1.h8k4.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

### 3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif analisis kualitatif. Penelitian dipusatkan pada dukungan Tiongkok pada masa pemerintahan Hu Jintao tahun 2003 hingga 2013 dimana pada tahun 2010 Tiongkok sempat sedikit bersitegang dengan Iran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data dengan mencari informasi melalui jurnal, tulisan serta skripsi yang berhubungan dengan dukungan Tiongkok terhadap Iran. Dari hasil studi pustaka, peneliti merasa data yang ditemukan sudah cukup untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, peneliti melakukan beberapa wawancara guna mendapatkan data yang spesifik untuk menyelesaikan penelitian ini. Wawancara sebagai studi lapangan dilakukan pada beberapa staf kedutaan besar Iran di Indonesia sehingga data yang didapat akan lebih akurat.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik reduksi data. Artinya, data-data yang diperoleh, baik melalui studi pustaka maupun penelusuran online, digunakan sesuai dengan keperluan penelitian berdasarkan pada tujuan penelitian. Hal ini bertujuan supaya data yang digunakan berkorelasi dengan perumusan masalah yang telah dibuat. Dari sejumlah data yang telah dikumpulkan, semuanya dianalisa kembali untuk memfokuskan masalah yang akan diteliti sehingga lebih jelas dan dapat disajikan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hubungan Luar Negeri Tiongkok dan Iran pada Masa Pemerintahan Hu Jintao

Tiongkok dan Iran yang telah memiliki hubungan yang baik sejak 200 tahun sebelum masehi, hingga tahun 2003 saat Hu Jintao memimpin masih memiliki hubungan yang

bahkan semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari hubungan kedua negara yang tidak pernah terlibat dalam konflik apapun dan tidak pernah ada pemutusan hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Iran.

Hubungan yang paling dinikmati oleh Tiongkok dan Iran yaitu di bidang ekonomi yang sangat luas meskipun mendapat beberapa hadangan dari sanksi Dewan Keamanan PBB. Kerjasama lain dari kedua negara juga di bidang energi dan konstruksi. Selain dari pada itu, dengan banyaknya perusahaan Tionghoa yang beroperasi di Iran menjadi sebuah bukti keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kehadirannya di pasar Iran.

Tiongkok telah muncul sebagai mitra ekonomi bagi Iran dengan menanamkan investasi yang besar di sektor energi serta mengisi kesenjangan yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan Barat yang dipaksa keluar karena sanksi internasional. Tahun 2008, *China National Petroleum Corporation* (CNPC) dan *National Iran Oil Company* (NIOC) menandatangani kesepakatan senilai \$1,76 miliar untuk mengembangkan minyak Iran di Azadegan Utara yang mana dapat menghasilkan lebih dari 75 ribu barel minyak per hari terhitung mulai tahun 2012. Di tahun 2009, Tiongkok menjadi mitra dagang paling penting bagi Iran dengan pertukaran bilateral senilai \$21,2 miliar yang mana pada tahun 2006 hanya mencapai \$14,4 miliar. Selain itu, CNPC juga kembali menandatangani kesepakatan dengan NIOC senilai \$5 miliar untuk mengembangkan lapangan fase 11. Proyek tersebut dirancang untuk menghasilkan sekitar 2 miliar m<sup>3</sup> gas dan 70 ribu barel kondensat gas per hari. CNPC menggantikan *French Energy Giant Total* setelah mengundurkan diri dari proyek ini ([http://www.irantracker.org/foreign-relations/china-iran-foreign-relations#\\_ftn45](http://www.irantracker.org/foreign-relations/china-iran-foreign-relations#_ftn45) diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Di tahun 2010, tidak terjadi perubahan terhadap hubungan kedua negara, namun sedikit perubahan ditunjukkan oleh Tiongkok terhadap sikapnya dalam mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB yang berisi sanksi untuk Iran, masih terkait program nuklirnya. Namun dalam hal ini Hu Jintao menjelaskan dukungannya terhadap PBB bukan berarti setuju untuk memberikan sanksi bagi Iran, tetapi Tiongkok meminta Iran untuk dapat bekerjasama dengan IAEA melalui laporan mengenai aktifitas nuklirnya agar terbukti bahwa Iran tidak melakukan pengembangan senjata nuklir.

Hingga tahun 2013, selama Presiden Hu Jintao memimpin Tiongkok, hubungan dengan Iran tetap berjalan dengan baik. Tiongkok

melalui kebijakan-kebijakannya terus memberikan dukungan bagi Iran dalam mengembangkan nuklir selama itu bertujuan untuk damai dan meminta negara-negara Barat terutama Amerika Serikat agar dapat menghentikan pemberian sanksi bagi Iran dan menyelesaikan kasus nuklir ini melalui jalan diplomatik tanpa harus adanya sanksi apalagi kekerasan.

## 4.2 Kepentingan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran

Sejak tahun 1990-an, peran Tiongkok dalam pasar energi global meningkat secara dramatis, yang mana antara tahun 2005 hingga 2008 pertumbuhan PDB Tiongkok tahunan rata-ratanya mencapai 10 persen, yang mana puncaknya pada tahun 2007 yaitu mencapai 13 persen. Untuk mendorong pertumbuhan ini, Tiongkok telah mengimpor sejumlah besar energi dan pada tahun 2006 Tiongkok menjadi negara ketiga didunia sebagai pengimpor minyak terbesar (*U. S. Energy Information Administration: China Country Analysis Briefs on July 2009*).

Pertumbuhan Tiongkok tentu akan terus berlanjut dan menurut *International Energy Agency*, pada tahun 2025 Tiongkok akan mengambil alih posisi Amerika Serikat sebagai pengimpor minyak dan gas terbesar di dunia. Tiongkok mengeluarkan kebijakan yang mendorong perusahaan energi nasional untuk melakukan investasi pada proyek luar negeri dalam upaya mengamankan sumber jangka panjang. Melalui kebijakan ini, perusahaan Tionghoa memiliki investasi dalam eksplorasi minyak dan gas serta proyek produksi dalam berbagai negara termasuk Iran. Perusahaan-perusahaan Tionghoa berinvestasi dalam sektor minyak dan gas alam Iran, memberikan Iran peralatan energi utama, teknologi dan layanan, memberi Iran minyak olahan dan membeli produk minyak bumi Iran (*U. S. Energy Information Administration: China Country Analysis Briefs on July 2009*).

## 4.3 Dukungan Tiongkok terhadap Pengembangan Nuklir di Iran

Tiongkok secara jelas menentang sanksi PBB sesuai dengan prinsip Hu Jintao sebagai Presiden Tiongkok selama tahun 2003 hingga 2013. Tiongkok tidak mau mendukung resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB kepada Iran terkait program nuklirnya. Tiongkok selalu percaya bahwa sanksi dan tekanan tidak harus menjadi pilihan dan tidak

akan kondusif bagi upaya diplomatik saat ini atas isu nuklir Iran.

Dari hasil studi pustaka ditemukan bahwa program nuklir yang dijalankan oleh Iran merupakan program dalam negeri yang pada awalnya tidak ada sangkut pautnya dengan negara lain, apalagi bila disangkutpautkan dengan keamanan negara sekitarnya. Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan negaranya, Iran selalu berusaha untuk bersifat independen dengan meminimalisir semaksimal mungkin ketergantungannya dengan negara lain. Prospek kebijakan luar negeri Iran pasca resolusi DK PBB no. 1737 tahun 2006 terkait dengan program nuklirnya tidak membuat banyak mengalami perubahan. Iran akan tetap melanjutkan program nuklirnya walaupun konsekuensi dijatuhkannya sanksi non-militer akan dialami oleh Iran.

Berdasarkan hasil analisa, Tiongkok selama masa kepemimpinan Hu Jintao terus menegaskan bahwa Tiongkok tetap mendukung pengembangan nuklir di Iran, dan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Hu Jintao dapat dikatakan sebagai kebijakan yang diambil dalam memandang permasalahan nuklir di Iran. Tiongkok tetap berpandangan positif kepada Iran karena selama ini saat IAEA melakukan pemantauan ke semua pusat reaktor nuklir di Iran, belum ditemukan satupun penyimpangan yang dilakukan oleh Iran guna menggunakan nuklir sebagai senjata pemusnah masal. Iran juga merupakan negara yang menandatangani NPT yang mana berisi larangan untuk memproduksi senjata nuklir, namun memberikan hak kepada setiap negara untuk memproduksi nuklir bila bertujuan untuk damai, hal ini dijelaskan dalam beberapa penelitian yang peneliti dapatkan dalam studi literatur yang dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Iran kembali melakukan pengembangan nuklir saat Iran mengalami masalah ekonomi dan menjadikan nuklir sebagai sumber listrik di Iran.

Tiongkok memberikan dukungan dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli dan material-material yang dapat membantu pengembangan nuklir di Iran. Hal ini dilakukan oleh Tiongkok guna memenuhi kepentingan nasionalnya, yang mana Tiongkok membutuhkan minyak yang dimiliki oleh Iran. Karena dukungan yang diberikan oleh Tiongkok, Iran pun memberikan timbal balik dengan menjamin pasokan gas selama 25 tahun terhitung tahun 2004. Kepentingan nasional Tiongkok tentunya terbantu dengan kerjasamanya dengan Iran. Karena kemajuan pesat teknologi di Tiongkok, maka dari itu kebutuhan untuk mendukung hal tersebut seperti halnya minyak juga terus meningkat, sehingga menjadi tujuan utama

Tiongkok untuk mencari cara memenuhi kepentingannya tersebut seperti yang dilakukan Tiongkok dengan Iran.

#### **4.4 Respon Iran terhadap Dukungan Tiongkok pada Pengembangan Nuklir di Iran**

Di tahun 2003 saat Presiden Hu Jintao baru memimpin Tiongkok, Iran masih dipimpin oleh Mohammad Khatami. Di tahun inilah masalah nuklir Iran mulai muncul dan tentunya Khatami sebagai Presiden di kala itu mempunyai andil dalam menyelesaikan masalah ini walaupun belum menjadi masalah internasional dan belum adanya sanksi terhadap Iran.

Kerjasama Iran dan Tiongkok belum begitu muncul di dunia internasional karena hubungan kedua negara masih terlihat biasa sebelum masalah nuklir di Iran menjadi masalah internasional. Bentuk-bentuk dukungan Tiongkok juga belum bisa dilihat pada masa pemerintahan Khatami sehingga Iran juga belum memberikan respon besar.

Respon yang paling terlihat pada masa pemerintahan Khatami yaitu Iran memberikan pasokan gas kepada Tiongkok selama 25 tahun terhitung dari tahun 2004. Hal ini dilakukan Iran karena selama ini Iran dan Tiongkok telah memiliki hubungan yang baik (<http://kanshaforlife.wordpress.com/2012/09/18/respon-rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb-atas-nuklir-iran-2006-2008-sebuah-studi-ko-mparasi/> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Selama pemerintahan Khatami, hubungan dengan Tiongkok berjalan seperti biasa, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum adanya peningkatan kerjasama di bidang ekonomi maupun bidang-bidang lainnya. Begitu juga bantuan Tiongkok terhadap Iran mengenai pengembangan nuklir Iran dimana masalah nuklir Iran baru mulai muncul dan dalam proses penelitian IAEA. Iran masih fokus terhadap penyelesaian masalah dan agar masalah nuklir ini tidak menjadi masalah internasional, walaupun pada akhirnya Amerika Serikat membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB (<http://surwandono.staff.ums.ac.id/2010/06/29/files/2010/06/nuklir-iran-antara-pujian-dan-kecaman.doc> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Tahun 2005, Khatami digantikan oleh Mahmoud Ahmadinejad melalui proses pemilu. Pada masa pemerintahan Ahmadinejad mulai diterapkan sanksi dari Dewan Keamanan PBB terhadap pengembangan nuklir Iran. Iran mendapat dukungan dari Tiongkok yang mana menolak menandatangani resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB

tersebut. Tiongkok menganggap sanksi tidak akan menyelesaikan masalah ([http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmoud\\_Ahmadinejad](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad) diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran menanggapi dingin sanksi yang diberikan pada negaranya terkait pengembangan nuklirnya. Ahmadinejad yang dikenal keras terhadap Amerika Serikat juga bersikap keras dan akan tetap melanjutkan proses pengembangan nuklirnya. Tiongkok mengharapkan adanya negosiasi antara negara-negara yang bermasalah dengan nuklir Iran agar masalah ini dapat segera diselesaikan, namun dengan sikap Ahmadinejad yang kuat terhadap keputusannya, Amerika Serikat jadi enggan untuk melakukan proses diplomasi (<http://indonesian.cri.cn/1/2008/04/16/1@80410.htm> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Selama bertahun-tahun Tiongkok terus memberikan dukungannya melalui penolakan terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada Iran oleh Dewan Keamanan Tetap PBB dengan resolusinya. Selama pemerintahan Mahmoud Ahmadinejad telah dikeluarkan sebanyak 9 resolusi yang dimulai dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Tiongkok juga masih tetap melakukan kerjasama dengan Iran walaupun jelas tertulis dalam resolusi bahwasanya tidak boleh adanya perdagangan dengan negara Iran terutama yang berhubungan dengan pengembangan uranium (<http://m.jpnn.com/news.php?id=827088> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Iran sangat terbantu dengan dukungan yang diberikan oleh Tiongkok, sehingga seperti yang sudah dijelaskan bahwa pilar utama hubungan kedua negara adalah di bidang ekonomi, sehingga Iran terus melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok yang mana memberikan Tiongkok kesempatan untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya. Iran memberikan ekspor minyak ke Tiongkok cukup besar. Melalui perusahaan-perusahaan Tionghoa juga Iran memberikan banyak jalan bagi Tiongkok untuk melakukan pengolahan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh Iran. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa kebutuhan konsumsi minyak Tiongkok hanya dapat dipenuhi dengan mengimpor dari negara lain, salah satu yang terbesar yaitu Iran. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah bentuk respon Iran di masa Ahmadinejad yang mana sangat terbantu dengan dukungan dari Tiongkok terutama dalam hal sanksi yang diberikan oleh Dewan Keamanan Tetap PBB yang tentunya termasuk sanksi-sanksi sepihak dari Amerika Serikat yang dirangkum dalam resolusi tersebut.

Memang hubungan Iran dan Tiongkok hingga tahun 2010 sangatlah baik. Namun di

tahun 2010 muncul perbedaan sikap dari Tiongkok kepada Iran. Tiongkok melakukan penandatanganan sanksi kepada Iran melalui resolusi Dewan Keamanan Tetap PBB 1929 tahun 2010.

Hal ini memang cukup mengejutkan beberapa pihak, namun Hu Jintao menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki alasan yang jelas. Menurut Presiden Hu, Iran melakukan kesalahan besar karena tidak dapat bekerjasama dengan IAEA dengan menghalangi IAEA melakukan pemantauan ke beberapa reaktor nuklir di Iran. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB sudah sebanyak 5 kali sebelum akhirnya Tiongkok ikut menyetujui sanksi bagi Iran.

Beberapa kerjasama yang dilakukan di tahun 2010 antara Iran dan Tiongkok menunjukkan bahwa walaupun Tiongkok ikut memberikan sanksi bagi Iran, hubungan kedua negara tetap terjalin di segala bidang. Bentuk sanksi yang dikeluarkan oleh DK PBB melalui resolusinya menjadi jalan bagi Tiongkok memberikan peringatan kepada Iran agar dapat bekerjasama dengan IAEA dan agar posisi Iran di dunia internasional tetap aman.

Di tahun 2013, Iran kembali berganti pemimpin. Hassan Rouhani menjadi Presiden Iran di tahun ini. Di awal kepemimpinannya, Rouhani banyak mengadaptasi kebijakan Ahmadinejad. Walaupun kebijakan yang dimiliki Rouhani tidak berbeda jauh dengan kepemimpinan sebelumnya, karena kita tahu bahwa siapapun Presiden Iran selalu tunduk dan mengikuti aturan dari Pemimpin Agung Iran, namun sikap dan gaya kepemimpinannya berbeda jauh dengan Ahmadinejad ([http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan\\_Rouhani](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani) diakses pada tanggal 21 April 2014).

Sikap Rouhani yang berbanding terbalik dengan Ahmadinejad adalah saat Rouhani menyatakan bahwa Iran siap membuka diri dan mau memperbaiki hubungannya dengan negara Barat terutama Amerika Serikat. Walaupun sikap yang ditunjukkan terkesan pro dengan Barat, namun Rouhani menegaskan bahwa Iran akan tetap pada kekuatan Republik Islamnya yang tidak menerima intervensi dari negara manapun (<http://www.dw.de/presiden-iran-rouhani-berpidato-di-pertemuan-davos/a-17382818> diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Beberapa bulan Hassan Rouhani berpapasan dengan kepemimpinan Hu Jintao di Tiongkok, namun Rouhani belum melakukan perubahan apapun dalam hubungannya dengan Tiongkok. Baru pasca Hu Jintao digantikan oleh Xi Jinping, Hassan Rouhani banyak melakukan perundingan dan menghasilkan beberapa kerjasama di berbagai bidang dengan Tiongkok (<http://article.wn.com/view/2014/05/>

16/IranTiongkok\_perluas\_seluruh\_hubungan\_dan\_kerja\_sama/ diakses pada tanggal 20 Mei 2014).

Di masa kepemimpinan Rouhani, Iran tidak memberikan respon apapun terkait dukungan Tiongkok saat dipimpin oleh Hu Jintao. Rouhani hanya melanjutkan kerjasama-kerjasama yang telah terjalin di masa kepemimpinan sebelumnya, juga terkait keberlangsungan pemberian pasokan gas dari Iran kepada Tiongkok yang telah berjalan selama 9 tahun terhitung dari tahun 2004.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tiongkok dan Iran merupakan 2 negara yang saling membutuhkan, dimana Tiongkok merupakan negara yang memiliki kemajuan pesat di bidang teknologi dan Iran merupakan negara yang memiliki sumber daya minyak yang melimpah sehingga kedua negara memiliki rasa saling ketergantungan. Hal ini menyebabkan terajadinya kerjasama antara kedua negara yang mana kerjasama dilakukan di berbagai bidang mulai dari bidang ekonomi, politik hingga militer.

Selain daripada itu, baik Tiongkok maupun Iran memiliki keuntungan dengan kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara. Tiongkok yang mendukung pengembangan nuklir di Iran juga memiliki keuntungan karena Iran memberikan pasokan minyak bagi Tiongkok. Bagi Iran sendiri, Tiongkok dapat memberikan perlindungan dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB karena Tiongkok merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto untuk merevisi isi dari resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Dukungan yang terus datang dari Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran tentunya di respon positif oleh Iran. Iran yang sejak awal mengembangkan uranium untuk kepentingan energi dalam negeri terus mendapat desakan dan masalah karena dianggap mengembangkan senjata nuklir terutama pasca Revolusi Islam yang terjadi yang membuat hubungan Iran dan Amerika Serikat memburuk. Namun dukungan yang diberikan oleh Tiongkok membuka harapan baru bagi Iran untuk terus melakukan pengembangan nuklir walaupun terus mendapat sanksi dari negara-negara barat melalui PBB. Hal ini tidak membuat Iran takut dan mundur karena Iran merasa bahwa apa yang dilakukan oleh negaranya tidak melanggar hukum dan Iran sendiri adalah

negara yang menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir, sehingga memiliki hak untuk mengembangkan nuklir selama bertujuan untuk damai. Tiongkok juga memberi dukungan karena menurut Hu Jintao, tekanan dan sanksi tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Iran bilamana memang melanggar hukum internasional dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik tanpa harus adanya kekerasan.

## 5.2 Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian mengenai dukungan Tiongkok terhadap pengembangan nuklir di Iran ini, peneliti memberikan beberapa saran baik secara substansial maupun akademis:

- Secara substansial terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, bahwasanya Tiongkok memiliki kepentingan terhadap Iran dan begitupun sebaliknya, hal ini dapat menjadi dorongan bagi negara lain untuk melihat sisi positif dari setiap hubungan diplomatik, karena dengan adanya proses diplomatik yang sesuai, maka konflik antar negara dapat diminimalisir sehingga masyarakat internasional dapat merasakan ketertiban dunia. Amerika Serikat yang selama ini melakukan penekanan terhadap Iran tentunya akan semakin sulit untuk dapat sambutan baik dari Iran bilamana Amerika Serikat memiliki kepentingan diluar masalah nuklir yang menjadi perdebatan dunia, namun seperti halnya Tiongkok, dukungan yang diberikan terhadap Iran menjadi sebuah jalan baru untuk Tiongkok dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya. Seperti kita ketahui bahwa setiap negara di dunia akan saling membutuhkan dalam upaya memenuhi kepentingan nasional sehingga terciptanya hubungan internasional.
- Secara akademis, penelitian dapat dijadikan acuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hubungan Tiongkok dan Iran pasca kepemimpinan Hu Jintao dan di masa yang akan datang. Peneliti selanjutnya dapat lebih spesifik lagi menjelaskan hubungan kedua negara serta meneliti lebih lanjut mengenai pengembangan nuklir yang terjadi di Iran. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara detail juga apa yang menyebabkan pengembangan nuklir di Iran menjadi masalah internasional.

## Daftar Pustaka

### Acuan dari buku:

- Buzan, Barry. 2008. *People, State and Fear*. Eropa:ECPR.
- Hinnebusch, Raymond. 2003. *The International Politics of the Middle East*. Inggris: Manchester University Press.
- Holsti, K. J. 1998. *Politik Internasional Jilid II*. Jakarta:Erlangga.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Politik*. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Johari, J. C. 2006. *New Comparative Government*. New Delhi: Lotus Press.
- Lenczowsky, George. 2003. *Timur Tengah di Tengah Kancah Dunia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Mas'ood, Mohtar. *Perbandingan Sistem Politik*. 2000. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parillo, Jill Marie. 2006. *Iran's Nuclear Program*. Official State of United Nation.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin.
- Rudy, T. May. 2002. *Studi Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafie, Inu Kencana dan Andi Azikin. 2007. *Perbandingan Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Thohir, Ajid. 2009. *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.

### Acuan Jurnal dalam Situs:

- Cina dan Iran. <http://nkrinews.com/index.php/internasional/1783-chna-dan-iran> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.
- China Foreign Policy. <http://www.foreignpolicy.com/China> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

China Iran Foreign Relations. [http://www.irantracker.org/foreign-relations/china-iran-foreign-relations#\\_ftn45](http://www.irantracker.org/foreign-relations/china-iran-foreign-relations#_ftn45) diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

China Tolak Seruan Sanksi Baru Iran. <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=38741> diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

Foreign Ministry Spokesperson's Press Conference on June 3, 2003. <http://www.china-un.org/eng/hyyfy/t28673.htm> diakses pada tanggal 1 Juni 2014.

Geography of Iran. [http://en.wikipedia.org/wiki/Geography\\_of\\_Iran](http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Iran) diakses pada tanggal 8 Maret 2014.

Hassan Rouhani. [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan\\_Rouhani](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Hassan_Rouhani) diakses pada tanggal 21 April 2014.

Hu Jintao and George W. Bush Clear Some Nuclear Issues. [http://english.pravda.ru/news/world/06-12-2007/102399-nuclear\\_questions-0/#.U5S0eHb\\_i00](http://english.pravda.ru/news/world/06-12-2007/102399-nuclear_questions-0/#.U5S0eHb_i00) diakses pada tanggal 2 Juni 2014.

Imminent Iran Nuclear Threat? A Timeline Of Warnings Since 1979. <http://www.informationclearinghouse.info/article30177.htm> diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

International Security. [http://en.wikipedia.org/wiki/International\\_security](http://en.wikipedia.org/wiki/International_security) diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Iran. <http://id.wikipedia.org/wiki/Iran> diakses pada tanggal 10 Maret 2014.

Iran. <http://www.countryreports.org/country/Iran.htm> diakses pada tanggal 8 Maret 2014.

Iran dan Tiongkok. <http://m.jpnn.com/news.php?id=827088> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Mahmoud Ahmadinejad. [http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmoud\\_Ahmadinejad](http://en.m.wikipedia.org/wiki/Mahmoud_Ahmadinejad) diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Menyerang Iran sama dengan Menyerang Rusia dan Cina. <http://islamtimes.org/vdcaiin6y49nuo1.h8k4.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Nuclear Law. [http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_law](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_law) diakses pada tanggal 1 Juli 2014.

Nuclear Program of Iran. [http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear\\_program\\_of\\_Iran](http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_program_of_Iran) diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Nuclear Weapon. <http://www.fas.org/nuke/guide/iran/nuke/> diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

Nuklir Iran Antara Pujian dan Kecaman. <http://surwandono.staff.umy.ac.id/2010/06/29/files/2010/06/nuklir-iran-antara-pujian-dan-kecaman.doc> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Nuklir Iran : Siapa Yang Menanam Angin, Dialah yang Menuai Badai. <http://arifnurcahyo-janisary.blogspot.com/2011/12/nuklir-iran-siapa-yang-menanam-angin.html> diakses pada tanggal 4 Mei 2014.

Presiden Iran Rouhani Berpidato di Pertemuan Davos. <http://www.dw.de/presiden-iran-rouhani-berpidato-di-pertemuan-davos/a-17382818> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Rahasia Pengembangan Nuklir Cina. <http://global.indonesianvoices.org/2013/10/rahasia-pengembangan-nuklir-Cina.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

Respon Rusia dan Cina Menyikapi Sanksi PBB atas Nuklir Iran. <http://kanshaforlife.wordpress.com/2012/09/18/respon-rusia-dan-cina-menyikapi-sanksi-pbb-atas-nuklir-iran-2006-2008-sebuah-studi-komparasi/> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

World Nuclear. <http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Iran/> diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

#### **Acuan dari Karya Ilmiah:**

Hendrasica, Andika. 2007. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir (Studi Kasus : Dugaan Pengembangan Senjata Nuklir Iran) (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.

Kartika, Dyah Kusumaningayu Ratna. Alasan Perubahan Sikap Cina Terhadap Masalah Nuklir Iran tahun 2010. Surabaya: Universitas Airlangga.

Nugroho, Agung. 2012. Dukungan Cina Terhadap Program Nuklir Iran (2006-2009). Jurnal Transnasional Vol. 4 No. 1.

Pratama, Tide Aji. 2008. Kebijakan Nuklir di Iran. Jakarta: Universitas Indonesia.

Utomo, Tri Cahyo. 2013. Akuntabilitas Program Nuklir Iran. Artikel Forum Iran Vol. 39.